

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara khususnya dalam bidang ekonomi (Sulaiman, 2013). Adanya data pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja pemerintah pada berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Kinerja perekonomian merupakan suatu usaha yang dilakukan menyangkut tingkah laku atau sikap dalam mencapai keberhasilan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Adanya pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian, dan sebaliknya bila negatif menunjukkan penurunan kinerja perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula dinikmati oleh masyarakat

sampai lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah (Sirojuzilam, 2015).

Dalam system perekonomian suatu Negara, baik secara agregat maupun secara regional terdapat 3 (tiga) cakupan ekonomi makro yang menjadi konsep dasar yang perlu selalu mendapat perhatian serius, yaitu diantaranya pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi, serta neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi berasal dari akumulasi kapital dengan kondisi terdapatnya peningkatan yang proporsional antara pendapatan nasional, konsumsi, dan investasi.

Dalam usaha untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan ekonomi, perlu suatu perencanaan bagaimana untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Maka dari itu, pemerintah senantiasa menciptakan perencanaan pembangunan baik daerah maupun pusat. Hal ini disebabkan karena perencanaan pembangunan merupakan faktor pendukung utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ompusunggu (2010) menyebutkan bahwa dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, ada 2 (dua) pokok permasalahan yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Bagaimana mengusahakan agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkesinambungan.
2. Bagaimana mengupayakan agar distribusi peningkatan pendapatan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

Dalam konsep perencanaan pembangunan, tersedianya dana untuk pembangunan, alokasi dana yang merata dan tepat sasaran, pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja merupakan beberapa hal pokok yang harus selalu diprioritaskan (Ompusunggu, 2010). Prinsip pemerataan alokasi dana dalam sistem pemerintahan otonomi di Indonesia dewasa ini telah dilaksanakan dengan adanya sistem transfer pendapatan antar pemerintah. Perencanaan pembangunan merupakan konsep perumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, strategi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan satuan kerja.

Perencanaan pembangunan ekonomi telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, Negara besar maupun kecil mempunyai rencana pembangunan yang baik atau rencana strategis dimana pembangunan ekonomi menjadi bagian terpenting. Banyak perusahaan memberikan bantuan financial, untuk rencana tersebut. Ada banyak jenis rencana pembangunan ekonomi, mencerminkan perbedaan sumber daya regional dan kesempatan perbedaan filosofi dari perencanaan (Sirojuzilam, 2015).

Perencanaan pembangunan ekonomi ini tidak bisa terlepas dari lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Secara substansial terdapat 3 (tiga) lingkup pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintahan yang lebih luas cakupannya

memberi arahan kepada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintahan yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah atau subsidi antar entitas pemerintah. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah)

Menurut Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pengertian propinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di wilayah negara atau negara bagian. Sedangkan kabupaten adalah pembagian wilayah administratif setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati.

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi besar yang memiliki berbagai keunggulan dan potensi. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang tersebar di wilayah pegunungan, pesisir, dan kepulauan. Populasinya

hampir mencapai 16% dari populasi Indonesia yang mendiami 2,5% dari wilayah Indonesia. Secara geografis, wilayah Jawa Timur terletak pada jantung penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia. Secara ekonomi, Jawa Timur menyumbang hampir 15% dari perekonomian nasional. Besarnya kegiatan ekonomi yang juga disebabkan oleh tingginya arus barang dan perdagangan di provinsi ini menyebabkan Jawa Timur memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Secara demografis, Jawa Timur merupakan wilayah dengan populasi terbesar kedua di Indonesia dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Rasio ketergantungan menunjukkan bahwa suatu penduduk usia non produktif bergantung pada dua orang penduduk usia produktif. Namun sumber daya manusia yang tersedia ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kualitas SDM masih relatif rendah.

Fenomena atau kejadian yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir setelah dimulainya desentralisasi Jawa Timur mengalami peningkatan kinerja daerah. Sejak desentralisasi, pemekaran yang terjadi di Jawa Timur hanya pemekaran satu kota. Seperti daerah lain, belanja pemerintah daerah mengalami peningkatan yang pesat dan kinerja ekonomi mengalami kemajuan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang secara riil mengalami peningkatan hampir dua kali lipat.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi baik pada tingkat agregat maupun internal wilayah. Pada tingkat agregat, Jawa Timur merupakan provinsi dengan populasi penduduk miskin terbesar di Indonesia.

Pada tingkat internal, ada dua persoalan yakni adanya kantong-kantong kemiskinan dan rendahnya perdagangan antar wilayah di Jawa Timur. Diketahui bahwa kemiskinan ternyata berkantong di daerah yang sebagian besar penduduknya perempuan, daerah yang perekonomiannya bergantung pada pertanian, serta daerah yang terletak di wilayah kepulauan dan pesisir utara seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017

Tahun	Penduduk Miskin
2014	4.748.400
2015	4.789.120
2016	4.703.300
2017	4.617.010

Sumber: BPS 2018 (data diolah)

Pada aspek perdagangan, hanya sebagian kecil dari total nilai perdagangan yang terjadi di dalam wilayah Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan wilayah dalam hal kemampuan produksi, konsumsi, dan penyediaan komoditas yang komplemen.

Alokasi belanja langsung pada umumnya diperuntukkan bagi pembangunan sarana atau prasarana dan infrastruktur. Pada prinsipnya alokasi belanja tersebut adalah bermuara pada optimalnya fungsi-fungsi keuangan di berbagai sektor yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industry dan pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut merupakan indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah.

Sedangkan alokasi belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, seperti belanja pegawai berupa gaji, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Pada prinsipnya alokasi belanja tidak langsung bertujuan untuk menunjang dan menopang aktivitas penyelenggaraan pemerintah untuk menjalankan fungsi dan kewajiban.

Infrastruktur adalah sektor yang memegang peranan penting untuk pertumbuhan yang inklusif serta penyediaan akses terhadap pelayanan publik. Jawa Timur memegang peranan penting dimana pembangunan infrastruktur merupakan salah satu langkah utama yang diambil oleh Provinsi Jawa Timur untuk mendukung strategi nasional tersebut. Tantangan infrastruktur yang dihadapi Jawa Timur adalah kualitas infrastruktur jalan yang masih harus ditingkatkan. Secara umum, kinerja infrastruktur dapat mengimbangi kinerja rata-rata nasional. Walaupun sebagian besar desa telah memiliki akses jalan, namun sebagian besar mengalami kerusakan, setidaknya seperlima dari jumlah jalan kabupaten/kota. Sebagai provinsi yang memiliki panjang jalan terpanjang kedua di Indonesia, ini merupakan permasalahan besar dimana pemeliharaan jalan tidak berjalan secara optimal.

Dari sisi nilai produksi bruto, kinerja pertanian Jawa Timur cukup baik, namun perlu perbaikan pada sub-sektor non tanaman pangan. Pertumbuhan riil sektor pertanian yang tetap positif, dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah yang masih cukup tinggi menunjukkan kinerja sektor secara makro masih cukup baik.

Masalah kesejahteraan petani masih merupakan tantangan besar di sektor pertanian. Sebagaimana terjadi pada umumnya di provinsi lain, tingkat upah pekerja di sektor pertanian di Jawa Timur secara rata-rata lebih rendah dibanding sektor lainnya. Di samping itu, persoalan peningkatan harga produk pertanian yang tidak sebanding dengan peningkatan harga barang input pertanian misal pupuk, benih, dll, dan harga-harga kebutuhan pokok mengakibatkan peningkatan produksi pertanian kurang berdampak secara langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Berdasarkan kejadian yang telah disebutkan diatas menarik minat peneliti untuk meneliti alokasi belanja langsung yang meliputi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal) dan belanja tidak langsung yang meliputi (belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan) terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Bagaimana kedua alokasi belanja daerah ini merangsang laju roda perekonomian di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur dan mempertahankan stabilitas perekonomian daerah menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Bagaimana efek yang dihasilkan terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh alokasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, diantaranya dilakukan oleh Ardiansyah Putra (2016) yang menyatakan bahwa secara simultan parsial belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Istia Nur Pradiatmi, Hardiyanto Wibowo (2015) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Deviani (2016) menyatakan bahwa ratio belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Runy Rusdyantinah Indrawaty (2017) menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Reza Monanda Berutu (2009) menyatakan bahwa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi. Rudibdo Hadi Sasana menyatakan bahwa belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks Karasidenan Semarang. Yeni Saerce Magdalena Lantu, dkk menyatakan bahwa alokasi belanja pemerintah baik melalui alokasi belanja langsung maupun alokasi belanja tidak langsung belum bisa memacu pertumbuhan ekonomi dengan signifikan. Bone Adiputra Simanullang (2017) menyatakan bahwa realisasi belanja tidak langsung mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan tidak signifikan secara statistik, dan juga menunjukkan bahwa realisasi belanja langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sesuai hipotesis dan tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk menguji kestabilan

hasil yang diperoleh dikarenakan beragamnya hasil yang diperoleh peneliti terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada alokasi belanja langsung yang meliputi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal) dan belanja tidak langsung yang meliputi (belanja hibah, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan). Untuk itu penulis membuat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Apakah belanja langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah jenis belanja dari kelompok belanja langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah jenis belanja dari kelompok belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah belanja langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Mengetahui apakah jenis belanja dari kelompok belanja langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Mengetahui apakah belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Mengetahui apakah jenis belanja dari kelompok belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmiah pada Ilmu Akuntansi khususnya di sektor publik yang terkait dengan alokasi belanja daerah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konsep penganggaran bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sehingga anggaran yang disusun mampu secara efektif dan juga efisien dalam realisasinya. Terutama yang berhubungan dengan kebutuhan anggaran belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak langsung,

belanja hibah, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.

Pemerintah daerah selaku eksekutor dalam penentuan kebijakan anggaran, mendorong agar lebih menyadari pentingnya peningkatan proporsi anggaran belanja daerah.

b) Bagi Masyarakat Jawa Timur

Sebagai bahan evaluasi guna melihat akuntabilitas anggaran pemerintah dalam proporsi anggaran belanja daerah, apakah sepenuhnya dari anggaran tersebut sudah relevan dengan realisasinya.

c) Bagi Akademisi

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa lebih kreatif dan inovatif lagi sehingga mampu memberikan alternatif lain yang lebih bermanfaat.

d) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai implementasi anggaran pemerintah daerah pada pelayanan publik khususnya terhadap anggaran belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal,

belanja tidak langsung, belanja hibah, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada pengaruh belanja daerah yang di ukur berdasarkan belanja langsung, jenis kelompok dari belanja langsung, belanja tidak langsung, dan jenis kelompok dari belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.